

**Penyalahgunaan Pas Lintas Batas oleh Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Kejahatan  
Melalui Pos Lintas Batas Jagoi Babang**

( Abuse Of Cross-Border By Third Parties Against Crime Occurrence Through  
Transboundary Post Jagoi Babang )

Penulis

**FX. NIKOLAS**

**A.21212081**

Prof. Dr. H. Garuda Wiko,SH.M.Si

Dr. Sy. HasyimAzirurrahman SH.M.HUM

**KATA PENGANTAR**

Memanjatkan Puji syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa,atas berkat dan Rahmat dan karuniaNya yang telah dilimpahkan kepada penulis, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penyalahgunaan Pas Lintas Batas oleh Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Lintas Batas Jagoi Babang** Merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Study di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan ini, penulis menyadari masih banyak sekali terdapat kekurangan dan kelemahannya, untuk itu dengan kerendahan hati penulis membuka diri untuk saran dan kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Di dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA Selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H.,M.Si Selaku Dekan Program magister Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Prof. Dr. H. Kammarullah, S.H.,M.Hum selaku ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Ibu Hj. Herlina, S.H.,M.H Selaku Ketua Konsentrasi Hukum Pidana
5. Bapak Dr. Sy. Hasyim, AZ, S.H.,M.HUM. Selaku Dosen Pembimbing Pembimbing I
6. Bapak H. M. Noor Ramli, S.H.,M.S Selaku Dosen Pembimbing II
7. Bapak Sampur Dongan Simamora, S.H., M.H Selaku Dosen Pembahas I
8. Bapak Fransiscus, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembahas II.

9. Bapak H. Aswandi, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembahas III.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Karyawan dan Karyawati di Lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak..
12. Ayahnda Supardi Hariyanto dan Ibunda Butet Silalahi
13. Menwa Mahapura Sat.601 Untan "*Widya Castrena Dharma Siddha.Jalan* menuju kebenaran.....SUSPELATNAS ANGKATAN 22
14. Teman - Teman Seperjuangan *Angkatan XII* , Serta Sahabat - Sahabatku

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas dukungan amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.Ucapan terima kasih ini tidak sebanding dengan apa yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dikemudian hari, tidak ada kata yang bisa penulis katakan selain ucapan terima kasih.

Pontianak, 18 Maret 2014

Penulis

**F.X NIKOLAS, S.H**

**NIM. A21212081**

## Abstrak

Kartu pas lintas batas yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini keimigrasian hasil dari perjanjian ( SOSEKMALINDO ) Pas Lintas Batas (PLB) adalah surat perjalanan laksana paspor yang dikeluarkan oleh pihak keimigrasian bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara republik Indonesia. Yang digunakan untuk berkunjung dan kegiatan - kegiatan pemerintahan seperti kegiatan sosial budaya perbatasan. Tetapi pada fakta dilapangan terjadi penyalahgunaan PLB oleh oknum pengusaha, dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk mencari keuntungan pribadi, dimana terdapat banyaknya barang – barang Malaysia yang beredar di daerah perbatasan, terutama pengusaha – pengusaha di daerah perbatasan banyak menjual barang – barang seperti beras, minyak goreng, gas, minuman alkohol, dan lain – lain. Maraknya keberadaan barang – barang tersebut maka bagaimana barang – barang tersebut dapat masuk dan diperjual belikan oleh pengusaha – pengusaha di daerah perbatasan. Melihat bagaimana barang – barang tersebut masuk di daerah perbatasan dapat dilakukan menggunakan Pas Lintas Batas, yaitu dengan membeli barang - barang yang berasal dari Malaysia, seperti gula, minyak goreng, gas, makanan ringan, dan bahan pokok yang lainnya, serta alkohol. Dengan harga - harga yang relatif yang lebih murah sangatlah memberikan peluang kepada oknum tertentu dalam hal ini pengusaha atau pihak ketiga dalam hal ini memanfaatkan masyarakat perbatasan untuk mengambil keuntungan yang sebesar – besarnya, dan dapat masuknya barang – barang dari Malaysia dikarenakan terjadinya loby ( tawar - menawar ) antara petugas pos lintas batas dan laskar dalam pemeriksaan barang yang dibawa pemilik pas lintas batas dan pada pas lintas batas Indonesia tidak dilakukan pemeriksaan baik itu barang itu melebihi kapasitas nominal serta berapa kali seseorang membawa barang yang bernominal RM 600/orang/bulan/. Dalam hal ini perspektif penulis kegiatan yang terjadi diperbatasan Jagoi Babang, merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu menjual barang – barang yang bukan berasal dari Indonesia melainkan berasal dari Malaysia, dalam perjanjian Sosek Malindo tidak terdapat masyarakat perbatasan yang di izinkan menjual kembali barang – barang yang sudah dibeli di Malaysia, dimana isi perjanjian Sosek Malindo hanya memberikan izin membeli sembilan bahan pokok dengan jumlah nominal yang sudah disepakati, jika melebihi maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, dimana masuknya barang – barang tersebut dengan cara memanfaatkan sarana pas lintas batas yang dimiliki oleh masyarakat perbatasan, seharusnya masyarakat perbatasan berbelanja menggunakan KILB yang dikeluarkan oleh pejabat Bea dan Cukai, bilamana masyarakat tidak mempunyai KILB maka tidak dapat berbelanja. Kegiatan penjualan barang – barang tersebut tidak diawasi oleh pemerintah dalam hal ini Bea dan Cukai dan pemerintah daerah, maka kegiatan jual – beli yang dilakukan masyarakat perbatasan, sangat merugikan kepentingan negara dalam bidang ekonomi khususnya kabupaten bengkayang, Secara umumnya Kalimantan Barat dimana harus segera dilakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegunaan kartu pas lintas batas tersebut yang ketat oleh pemerintah baik pemerintah daerah, dan pemerintah pusat serta penegak hukum.

## Abstract

Cross-border passes issued by the Indonesian government in this case results from immigration agreement (SOSEKMALINDO) cross-border (PLB) is a travel document like a passport issued by the immigration for Indonesian citizens who live in the border regions of the Republic of Indonesia. Who used to visit and activities - governmental activities as socio-cultural activities of the border. But in fact the field occurs PLB abuse by unscrupulous employers, by making use of government policy to seek personal gain, where there are many goods - Malaysian goods circulating in the border areas, especially businessmen - businessmen in border areas many selling goods - goods such as rice, cooking oil, gas, alcohol, and others - others. The rise of the existence of the goods - the goods are then how goods - the goods can enter and be traded by entrepreneurs - entrepreneurs in the border area. Seeing how the goods - the goods are entered in the border area can be done using a cross-border, ie the purchase of goods - goods originating from Malaysia, such as sugar, cooking oil, gas, snacks, and other staples, as well as alcohol. With a price - the price is relatively cheaper is giving a chance to a certain person in this case the employer or a third party in this case utilizing the border communities to take advantage of - magnitude, and may be the entry of goods - goods due to the lobbying of Malaysia (bargaining - bid) between the border crossing officers and paramilitary troops in the inspection of goods brought right owner and the right of cross-border cross-border inspection Indonesia is not good that the goods exceeds the nominal capacity and the number of times a person carrying goods bernominal RM 600 / person / month /. In this case the author's perspective of activities that occur on the border Jagoi Babang an unlawful act, ie selling goods - goods that are not originating from Indonesia but from Malaysia, in the Socio-Economic Agreement Malindo border communities are not permitted to resell the goods - goods that have been purchased in Malaysia, where the contents of the Socio-Economic agreement Malindo only give permission to buy nine basic with a nominal amount that has been agreed upon, if exceeded, then such actions are against the law, where the entry of goods - goods are fit by utilizing cross-border means being owned by the community border, border communities should shop using KILB issued by Customs officials, when the people have no KILB then not be able to shop. Sales activities of goods - the goods are not supervised by the government in this case the Customs and Excise and local government, then the selling activities - purchase made border communities, is very detrimental to the interests of the state in the economic field in particular gorged district, West Kalimantan In general, which must be done supervision and regulation of cross-border usability passes the strict government both local government and central government as well as law enforcement.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai wilayah perbatasan darat antar negara, yaitu perbatasan dengan Sarawak Malaysia Timur dengan panjang garis batas kurang lebih 966 Km yang meliputi 5 wilayah Kabupaten di Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Sambas, Sanggau, Bengkayang, Sintang dan Kapuas Hulu. Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat terdapat 40 Desa yang terdiri dari 62 Dusun yang berbatasan langsung dengan Sarawak-Malaysia, dengan luas wilayah Kecamatan perbatasan  $\pm 24.206,5$  Km<sup>2</sup> dan kepadatan penduduk rata-rata 8 orang/Km<sup>2</sup>. Dan jumlah Desa tersebut telah disepakati 16 Desa di Kalimantan Barat dan 10 Kampung di Sarawak yang ditetapkan sebagai Pos Lintas Batas (PLB), berdasarkan perjanjian Lintas Batas RI- Malaysia yang telah ditandatangani pada bulan Februari 2006 di Bukittinggi, dimana penduduk setempat hanya dengan menggunakan Pas Lintas Batas dapat saling mengunjungi dalam jangka waktu selama 14 hari. Melalui kerjasama Sosek Malindo, secara bertahap disepakati pembukaan Gate-gate tersebut, yaitu Entikong-Tebedu telah dioperasikan sejak tanggal 25 Februari 1991 yang merupakan hubungan darat/gate resmi pertama yang ada di Kalimantan Barat, Dengan adanya PLB ini memudahkan dan memperlancar masuk dan keluarnya arus barang dan orang meskipun di sisi lain juga menimbulkan kerawanan di antaranya kegiatan perdagangan ilegal merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan – aturan formal yang berlaku meliputi 2 jenis :

- **Perdagangan lintas batas illegal skala kecil yang tidak mengindahkan peraturan lintas batas ( border Crossing agreement/ BCA) atau perjanjian lintas batas**
- **Perdagangan ilegal skala besar yang tidak mengindahkan aturan perdagangan ekspor – impor.<sup>1</sup>**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 188/PMK.04/2010 tentang Impor barang yang dibawa penumpang, awak sarana pengangkutan, pelintas batas yang dibawa penumpang<sup>2</sup>. Kartu pas lintas batas yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini keimigrasian hasil dari perjanjian ( SOSEKMALINDO ) Pas Lintas Batas (PLB) adalah surat perjalanan laksana paspor yang dikeluarkan oleh pihak keimigrasian bagi warga negara Indonesia yang

---

<sup>1</sup> BAPPENAS. Bab II Draf Rencana Ink pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan tahun 2011-2014. Hal. 12

<sup>2</sup> M. Wahyudi SH.MH, Seminar daerah, perdagangan lintas batas Kalimantan Barat dan Sarawak, PMIH. Pontianak, Hal.3

berdomisili di wilayah perbatasan negara republik Indonesia. Yang digunakan untuk berkunjung dan kegiatan - kegiatan pemerintahan seperti kegiatan sosial budaya perbatasan. Tetapi pada fakta dilapangan terjadi penyalahgunaan PLB oleh oknum pengusaha, dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah untuk mencari keuntungan pribadi, dimana terdapat banyaknya barang – barang Malaysia yang beredar di daerah perbatasan, terutama pengusaha – pengusaha di daerah perbatasan banyak menjual barang – barang seperti beras, minyak goreng, gas, minuman alkohol, dan lain – lain. Maraknya keberadaan barang – barang tersebut maka bagaimana barang – barang tersebut dapat masuk dan diperjual belikan oleh pengusaha – pengusaha di daerah perbatasan. Melihat bagaimana barang – barang tersebut masuk di daerah perbatasan dapat dilakukan menggunakan Pas Lintas Batas, yaitu dengan membeli barang - barang yang berasal dari Malaysia, seperti gula, minyak goreng, gas, makanan ringan, dan bahan pokok yang lainnya, serta alkohol. Dengan harga - harga yang relatif yang lebih murah sangatlah memberikan peluang kepada oknum tertentu dalam hal ini pengusaha atau pihak ketiga dalam hal ini memanfaatkan masyarakat perbatasan untuk mengambil keuntungan yang sebesar – besarnya, dan dapat masuknya barang – barang dari Malaysia dikarenakan terjadinya loby ( tawar - menawar ) antara petugas pos lintas batas dan laskar dalam pemeriksaan barang yang dibawa pemilik pas lintas batas dan pada pas lintas batas Indonesia tidak dilakukan pemeriksaan baik itu barang itu melebihi kapasitas nominal serta berapa kali seseorang membawa barang yang bernominal RM 600/orang/bulan/. Dalam hal ini perspektif penulis kegiatan yang terjadi diperbatasan Jagoi Babang, merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu menjual barang – barang yang bukan berasal dari Indonesia melainkan berasal dari Malaysia, dalam perjanjian Sosek Malindo tidak terdapat masyarakat perbatasan yang di izinkan menjual kembali barang – barang yang sudah dibeli di Malaysia, dimana isi perjanjian Sosek Malindo hanya memberikan izin membeli sembilan bahan pokok dengan jumlah nominal yang sudah disepakati, jika melebihi maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, dimana masuknya barang – barang tersebut dengan cara memanfaatkan sarana pas lintas batas yang dimiliki oleh masyarakat perbatasan, seharusnya masyarakat perbatasan berbelanja menggunakan KILB yang dikeluarkan oleh pejabat Bea dan Cukai, bilamana masyarakat tidak mempunyai KILB maka tidak dapat berbelanja. Kegiatan penjualan barang – barang tersebut tidak diawasi oleh pemerintah dalam hal ini Bea dan Cukai dan pemerintah daerah, maka kegiatan jual – beli yang dilakukan masyarakat perbatasan, sangat merugikan kepentingan negara dalam bidang ekonomi khususnya kabupaten Bengkayang, Secara umumnya Kalimantan Barat dimana harus segera dilakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegunaan kartu pas lintas batas

tersebut yang ketat oleh pemerintah baik pemerintah daerah, dan pemerintah pusat serta penegak hukum.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis lebih jauh dalam bentuk tesis tentang **“Penyalahgunaan Pas Lintas Batas oleh Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Lintas Batas Jagoi Babang”**

## **B. Masalah Penelitian**

Semangkin maraknya penjualan barang – barang di perbatasan seperti kebutuhan bahan pokok, dan alkohol, dan tenaga kerja Ilegal yang mencari pekerjaan di Malaysia, serta keberadaan kendaraan roda dua di perbatasan Jagoi Babang, keberadaan barang – barang tersebut dikarenakan adanya PLB yang menjadi jalur atau sarana pendukung untuk dapat masuknya barang – barang tersebut di wilayah Indonesia, disehingga menjadi masalah dalam penelitian ini :

***Mengapa terjadinya penyalahgunaan pas lintas batas oleh pihak ketiga terhadap terjadinya kejahatan melalui Pos Pas Lintas Batas Jagoi Babang?***

## **C. Tujuan penelitian**

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaraannya,maka perlu dirumuskan tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis mengapa terjadinya penyalahgunaan pas lintas batas oleh pihak ketiga terhadap terjadinya kejahatan melalui pas lintas batas Jagoi Babang.
2. Untuk mengungkapkan kendala – kendala yang dihadapi instansi terkait terhadap penyalahgunaan pas lintas batas Jagoi Babang
3. Untuk mengungkapkan upaya menanggulangi penyalahgunaan pas lintas batas Jagoi Babang

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi seluruh pihak baik dan kalangan yang memanfaatkannya baik secara teoritis dan praktis antara lain sebagai berikut :

- Secara teoritis

Merupakan bahan untuk melakukan penelitian dan memperkaya keilmuan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan kejahatan di perbatasan, khususnya perbatasan Jagoi Babang.

- Secara praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis dan kepada steakholder, para aparaturnegara penegak hukum, penyelenggara pemerintah, advokat dan masyarakat luas tentang masalah – masalah dan ruang lingkup daerah perbatasan, khususnya perbatasan Jagoi Babang.

## **E. Kerangka Pemikiran Teoritik**

### **1. Tinjauan Pustaka**

#### **1.1 Pengertian kriminologi, Kejahatan dan Penegak hukum**

Kriminologi seperti yang disampaikan oleh **Sutherland** bahwa kriminologi sebagai Keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social( The Body Of Knowledge regarding crime as a social phenomenon) yaitu mencakup proses – proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Menurut **Paul Moedigdo Moeliono** berpendapat kriminologi adalah Sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.<sup>3</sup> **Wolfgang dkk** berpendapat merumuskan definisi kriminologi yaitu Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan – keterangan, keseragaman – keseragaman pola – pola dan faktor – faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya, sehingga obyek kriminologi adalah

- **Perbuatan yang disebut dengan kejahatan**
- **Pelaku kejahatan**
- **Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.**<sup>4</sup>

Pendapat **J. Contstant** berpendapat bahwa definisi kriminologi adalah Ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor – faktor yang menjadi sebab – musabab terjadinya kejahatan atau penjahat. Penyalahgunaan dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang mana proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; kewenangan kekayaan yang diperolehnya adalah

---

<sup>3</sup> Soedjono.D. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia. 1976.hal.24

<sup>4</sup> Topo santoso dan eva achjani zulfa, *Kriminologi* , PT. Raja grafindo persada,jakarta, 2010



hasil jabatannya<sup>5</sup> Dalam undang – undang kitab hukum pidana dalam buku ke II menyebutkan dari pasal 104 sampai dengan pasal 488 tentang kejahatan<sup>6</sup>

Menurut **Kartono** “ Secara sosiologis, kejahatan adalah *Semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan social psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana.* Maka dari itu bersandar dengan pendapat **Emile Durkheim** bahwa kejahatan adalah Suatu gejala normal dalam masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dimusnakan habis.<sup>7</sup>

Tantangan yang dihadapi penegak hukum tidak semangkin ringan, tepi semangkin bertambah berat. Hal ini mungkin lemahnya penegak hukum di negeri ini, dimana penegak hukum adalah keseluruhan kegiatan dari penegak hukum kearahnya tegaknya hukum, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum harus sesuai dengan Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan diterapkannya hukum adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal untuk perlindungan masyarakat yang sering disebut dengan istilah “*Social Defence*”<sup>8</sup>

Menurut **Barda Nawawi** ada aspek perlindungan masyarakat yang harus juga mendapat perhatian dalam penegakan hukum pidana khususnya yaitu :

- a. **Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka wajar penegak hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.**
- b. **Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang.**
- c. **Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan.<sup>9</sup>**

---

<sup>5</sup> [www.Google.com](http://www.Google.com), Arti kata Bahasa Indonesia diakses, tanggal 18 Maret 2014, jam 22.30 wib

<sup>6</sup> Kitab undang – undang hukum pidana, Kesindo Utama, Surabaya.2007

<sup>7</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, pusat pelayan keadilan dan pengabdian hukum universitas indonesia, jakarta.hal.2. emile durkheim, The normal and the pathological, dalam marvin E. Wolfgang et.al.The sociology of crime and delinquency, second edition, john wiley & sons 1970

<sup>8</sup> Barda nawawi arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*. PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 1988.Hal. 11

<sup>9</sup> Ibid.Hal.13

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia, hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan berlangsung secara normal, damai, tetapi terjadi karena pelanggaran hukum maka pelanggaran hukum itu harus ditegakkan dengan cara penegakan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu:

- 1. Kepastian hukum ( rechtssicherheit)**
- 2. Kemanfaatan hukum (zweckmassigkeit)**
- 3. Keadilan (gerechtigkei)<sup>10</sup>**

Penegakan hukum jika dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:

- 1. Tahap formasi, yaitu tahap penegak hukum in abstracto oleh badan pembuat undang – undang.**
- 2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum oleh penegak – penegak hukum.**
- 3. Tahap eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum secara konkrit oleh penegak hukum.<sup>11</sup>**

Menurut **Wijono Prodjodikoro**, tindak pidana adalah Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana.<sup>12</sup>

Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh **Moelyantno**, yang menyebutkan istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana adalah sebagai berikut “ Perbuatan yang diatur hukum pidana dilarang diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar aturan tersebut”<sup>13</sup> Undang – undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang – Uandang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan pada pasal 102 setiap orang yang :

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dalam Pasal 7A ayat (2);**
- b. Membongkar barang impor di luar kawasan pabeaan atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabeaan;**
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabeaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 3;**

---

<sup>10</sup> Ibid.Hal.14

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*,Pustaka pelajar Yogyakarta 2005.Hal.111

<sup>12</sup> Wirjono projodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*,PT.Eresco bandung 1998,hal 55

<sup>13</sup> Prof.moelyantno,SH.*Perbuatan Oidan Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*,Bina Aksara, Jakarta,1998,hal.20

- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabeaan ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan / atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeaannya dari kawasan pabeaan atau dari tempat penimbunan berikat atau persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang – Undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabeaan tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa tersebut di luar kemampuannya atau;
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan / atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabeaan secara salah; Dipidana karena melakukan penyeludupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 ( satu ) tahun dan pidana penjara paling lama 10 ( sepuluh ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 ( Lima Miliar Rupiah ).<sup>14</sup>

Pengertian tindak pidana penyeludupan dalam bahasa Inggris “ **Smuggle** ” dan dalam bahasa belanda “ **Smokkle** ” yang artinya mengimpor, mengekspor, mengantarkan barang dengan tidak mmenuhi formalitas pabeaan yang diterapkan oleh undang – undang dan peraturan pemerintah.<sup>15</sup> Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia adalah tindak adalah langkah atau perbuatan. Kata Pidana yang artinya kejahatan. Sedangkan kata penyeludupan yang kata dasarnya adalah seludup artinya menyuruk, masuk dengan diam – diam, menukik dan menyelinap. Jadi dapat diartikan penyeludupan adalah proses, cara perbuatan menyeludup sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyeludupan adalah perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan diam – diam atau menyelinap. Berdasarkan uraian diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya dari penyeludupan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan cara menghindar dari bea cukai atau bea keluar supaya mendapat keuntungan besar. Untuk mengetahui lebih jauh tentang penyeludupan ini, maka penulis membagi jenis – jenis penyeludupan yang terjadi adapun dua jenis penyeludupan tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>14</sup> Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006 Pasal 102

<sup>15</sup> Soufnir chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyeludupan Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 5

1. **Penyeludupan impor adalah suatu perbuatan memasukkan barang – barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang – barang dari Indonesia**
2. **Penyeludupan ekspor adalah pengeluaran barang – barang dari Indonesia keluar negeri tanpa melalui prosedur atau ketentuan peraturan perundang – undangan.**<sup>16</sup>

Penegak hukum adalah kegiatan menyasraskan hubungan nilai – nilai yang terjabar dalam kaidah – kaidah, pandangan – pandangan dalam menciptakan sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai untuk menciptakan kedamaian karena tegaknya hukum dapat dilihat dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Penegakan hukum tidak hanya mencakup Law Enforcement tetapi juga peace maintenance, hal ini karena pada hakekatnya penegal hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai – nilai, keadaan – keadaan dan pola perilaku yang nyata bertujuan untuk mencapai kedamaian<sup>17</sup>. Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif, penegakan hukum secara preventif adalah untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran hukum, dan penegakan hukum secara represif yaitu jika tindakan preventif tidak berhasil dilakukan maka perlu adanya penindakan dari penegak hukum secara hukum. Tindakan hukum secara represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui lembaga yang secara organisatoris yang terpisah satu dengan yang lainnya namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sampai kepada lembaga kemasyarakatan. Hukum harus ditegakkan dan harus dilaksanakan setiap orang mengharapnkan terapannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkrit hukum berlaku sebagaimana mestinya dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, fiat justitia et pereanmudus ( meskipun langit akan runtuh hukum harus di tegakkan). Sesungguhnya masyarakat sangat mengharapnkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan merasa aman dan tentram hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk adanya ketertiban masyarakat. Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, hukum tidak di identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang ,bersifat menyamaratakan tidak membedakan – bedakan antara golongan, jabatan, miskin, kaya, akan

---

<sup>16</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Amir Mushsin, *Kejahatan – Kejahatan Yang Merugikan Negara Dan Membahayakan Negara*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1978, hal. 64

<sup>17</sup> M.Faa, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, PT Pradnya Paramitra, Jakarta, 1991, Hal.98

tetapi keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan karena keadilan bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.

Seseorang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya tanpa adanya kepastian hukum dan akhirnya timbul keresahan, rasa keadilan dan rasa kaku juga akan timbul apabila terlalu menitik beratkan kepada kepastian hukum dan terlalu ketat mentaati aturan hukum. akan tetapi demikianlah peraturan yang harus ditaati dan dijalankan undang – undang itu kejam jika dijalankan secara ketat : ***Lex dura sed tamen scripta (undang – undang itu kejam tetapi demikianlah bunyinya).*** Asas penegak hukum yang tetap sederhana, dan biaya ringan saat ini belum tentu sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat sejalan dengan itu, masih ditemukan perilaku penegak hukum yang merugikan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat banyak melakukan yang bertentangan dengan peraturan dengan melihat aparat penegak hukum bertentangan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku yang ditunjukan kepada diri sendiri, keluarga, Institusi dan kelompok. Ikut serta masyarakat secara baik dan optimal sesuai ketentuan dalam proses penegak hukum tentu banyak sekali manfaatnya maka dari itu penegak hukum harus berusaha tidak merugikan kepentingan masyarakat. Berbicara tentang hukum tidak terlepas dari pelaku tindak pidana yaitu perbuatan pidana kesalahan dan korban. Menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut KUHAP dijelaskan pelaku tindak pidana adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut seterusnya disebut sebagai tersangka.

**Wijono Prodjodikoro**, tindak pidana adalah Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana<sup>18</sup>.

**Moelyantno**, perbuatan pidana adalah sebagai berikut “ Perbuatan yang diatur hukum pidana dilarang diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar aturan tersebut<sup>19</sup>, Hakekatnya sebagai alat untuk memaksa masyarakat agar tidak melakukan suatu perbuatan yang merugikan diri sendiri dan Negara pada umumnya, akan tetapi tidak dapatlah berjalan suatu peraturan jika tidak adanya aparat penegak hukum untuk menegakannya maka dari itu menurut **Soerjono soekanto** penegak hukum adalah “Menyerasikan hubungan nilai- nilai

---

<sup>18</sup> Wirjono prodjodikoro, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco Bandung 1998, hal 55

<sup>19</sup> Prof. moelyantno, *SH. Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hal. 20

yang tersebar didalam kaidah – kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihat dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>20</sup>”

Inti dari penegakan hukum adalah menciptakan suatu keadaan yang baik didalam lingkungan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran. Dengan dijatuhinya sanksi kepada pelaku diharapkan masyarakat sadar akan larangan yang merugikan kepentingan bersama, agar efektifitas penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: “

- **Faktor hukum itu sendiri**
- **Faktor penegak hukum,yakni orang – orang yang menerapkan hukum**
- **Faktor sarana penegak hukum**
- **Faktor masyarakat,yakni lingkungan dimana hukum itu diterapkan.**
- **Faktor budaya**<sup>21</sup>

Dari kelima faktor tersebut sangat lah penting adalah para penega hukum harus berkualitas dan memiliki mentalitas yang baik, hal ini mengingat aparat penegak hukum salah satu panutan bagi masyarakat disisi lain masyarakat juga harus mempunyai kesadaran hukum yang tinggi sehingga mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. “Sesuai dengan cita – cita penegak hukum kita serta mempertimbangkan dinamika dan perkembangan masyarakat maka penegak hukum dengan pendekatan yuridis semata – mata sudah tidak memadai, pendekatan yuridis sebagai pendekatan utama dalam penegakan hukum perlu dilengkapi dengan pendekatan sosio politik dan sosio cultural. Pendekatan yuridis dalam penegak hukum dimaksudkan sebagai penerapan norma atau ketentuan hukum secara tepat dan benar sesuai keyakinan penegak hukum. Pendekatan sosio-politik dalam penegak hukum dimaksud untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas dan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional serta kokohnya persatuan kesatuan bangsa. Pendekatan sosio-kultural dalam penegakan hukum berarti bahwa nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga rasa keadilan masyarakat dapat lebih terpenuhi yang lebih jauh akan meningkatnya kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum.<sup>22</sup>”

Dari ketiga pendekatan tersebut diatas tidaklah bisa hanya penegak hukum yang dapat menjalankan tugasnya, sehingga aparat penegak hukum sangat membutuhkan masyarakat

---

<sup>20</sup> Soerjono soekanto,*Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* ,PT.Raja grafindo Persada,Jakarta,2002,Hal 3

<sup>21</sup> Ibid.Hal. 4

<sup>22</sup> Sukarton.Marmosudjono,*Penegakan Hukum Di Negeri Pancasila Pusta Kartini*,Jakarta hal 20

dalam mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum sehingga peran serta masyarakat merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang optimal : “ Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan –ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya apabila kesadaran hukum sangat rendah maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi dengan demikian, pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari ketentuan – ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya.<sup>23</sup>”

Beberapa indikator kesadaran hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan kesadaran hukum yang baik di dalam masyarakat diperlukan adanya pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bahwa perilaku – perilaku diatur oleh hukum dan memahaminya kemudian dapat menilai hukum itu sendiri dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain dapat mematuhi hukum yang berlaku dengan baik. Pendekatan yuridis sebagai pendekatan utama dalam penegakan hukum perlu dilengkapi dengan pendekatan sosio politik dan sosio cultural. Pendekatan yuridis dalam penegakan hukum dimaksudkan sebagai penerapan norma atau ketentuan hukum secara tepat dan benar sesuai keyakinan penegak hukum. Pendekatan sosio-politik dalam penegakan hukum dimaksud untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas dan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional serta kokohnya persatuan kesatuan bangsa. Pendekatan sosio-kultural dalam penegakan hukum berarti bahwa nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga rasa keadilan masyarakat dapat lebih terpenuhi yang lebih jauh akan meningkatnya kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum<sup>24</sup>. Pengertian dan pendapat para ahli tentang tindak pidana atau kejahatan sangat erat berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, tanggungjawab pidana terjadi karena adanya kesalahan Voss memberikan pengertian kesalahan itu mengandung 3 unsur yang terdiri dari :

- a. Kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan**
- b. Hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan**
- c. Tidak terdapat alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu<sup>25</sup>**

Mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana proses yang akan dilalui adalah sanksi akan tetapi sebelum menjatuhkan sanksi perlu dipahami bahwa

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers Jakarta, Jakarta 1982.Hal.215

<sup>24</sup> Sukarton.Marmosudjono, *Penegakan hukum di negeri pancasila* Pustaka kartini, Jakarta hal 20

<sup>25</sup> Bambang Poernomo, *Asas – asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001,Hal.135

seseorang yang mempertanggungjawabkan perbuatannya harus lah sesuai dengan asas yang berlaku di Indonesia yang menjadi dasar KUHP yang berlaku pada Pasal 1 yaitu asas Legalitas menurut Anselm Von Feuerbach asas legalitas pada intinya Nullum crime nulla poena sine praevia lege yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuan undang – undang yang mengatur, artinya bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika belum ada peraturan yang mengatur perbuatan itu, karena asas ini asas yang menjadi dasar dalam proses hukum di Indonesia tetapi terdapat pengecualiaan kejahatan yaitu kejahatan Narkoba, Teroris dan Korupsi. Sebelum manjatuhkan sanksi kembali dalam proses peradilan di Indonesia adalah proses pemidanaan, dalam proses pemidanaan adalah proses dimana seseorang yang telah terbukti melakukan kesalahan dan sudah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, secara teori ada 2 teori yang dikemukakan oleh Simons dalam proses pemidanaan yaitu :

1. Teori – teori pencegahan umum atau *algemene preventie theorieen*, yang ingin mencapai tujuan dari pidana yaitu semata – mata dengan membuat jera setiap orang agar mereka itu tidak melakukan kejahatan – kejahatan lagi.
2. Teori – teori pencegahan khusus atau *bijzondere preventie theorieen* yang ingin mencapai tujuan dari pidana itu membuat jera, dengan memperbaiki dan dengan membuat penjahatnya itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan – kejahatan lagi.<sup>26</sup> Artinya dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan untuk mendidik penjahat agar tidak melakukan perbuatan atau kejahatan ( tindak pidana) kembali sehingga Sahardjo berpendapat di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seseorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, atau dengan perkataan lain tujuan dari pidana penjahat adalah pemasyarakatan.<sup>27</sup> Prof. Barda dalam RKUHP dalam perumusan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan adalah sebagai berikut;

1. **Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan ( Purposive system ) dan pidana hanya merupakan alat / sarana untuk mencapai tujuan**
2. **Tujuan pidana merupakan bagaian integral ( Sub-Sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan ( Sistem hukum pidana) disamping sub-sistem lainnya,**

---

<sup>26</sup> P.A.F lamintang, Hukum Pamitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984, Hal. 15

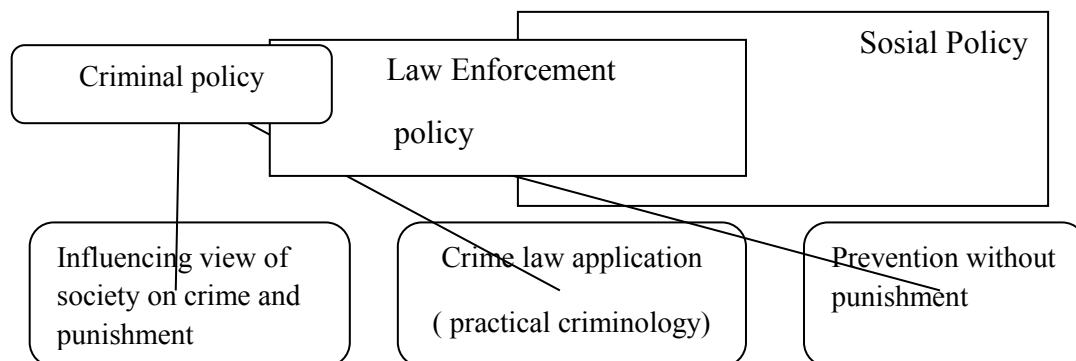
<sup>27</sup> Ibid. Hal. 33



yaitu sub-sistem tindak pidana pertanggungjawaban pidana ( kesalahan) dan pidana

3. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendalian /kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar / landasan filosofis , rasionalitas, motivasi dan Justifikasi pemidanaan
4. Dilihat secara fungsional/ operasional sistem pemidanaan merupakan suatu rangkian proses melalui tahap formulasi ( kebijakan legislatif) tahap aplikasi, ( kebijakan judicial/judikatif) dan tahap eksekusi ( kebijakann administratif/eksekutif) <sup>28</sup>

Suatu usaha yang dapat dilakukan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa ” Criminal policy is the rational organization of the social reaction” <sup>29</sup> penanggulangan kejahatan pada dasarnya merupakan upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, **G.P. Hoefnagels** membuat skema bagaimana cara untuk tujuan tersebut tercapai.



Skema yang di berikan **G. Peter. H**, bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti :

- a. Adanya keterpaduan ( Integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial
- b. Adanya keterpaduan ( Intergralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan Penal dan Non Penal.<sup>30</sup>

Kebijakan lain yang dapat dilakukan menurut **G. Peter H**, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana( criminal law application)

<sup>28</sup> Prof. Dr. Barda Nawawi Arief,SH. Tujuan dan pedoman Pemidanaan ( perspektif pembaharuan dan pembandingan hukum pidana) Pustaka magister semarang.semarang, 2011.Hal 3-4

<sup>29</sup> Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, Bunga Rampai” *Kebijakan hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta.Hal.3-4 dapat dibaca juga G.Peter Hoefnagels, *The Other side of Criminology*,1969,Hal.57

<sup>30</sup>Ibid. Hal.5-6, dan dapat di baca G.Peter Hoefnagels, *The Other Side Of Criminology*,1969,Hal.56-57

- b. Pencegahan tanpa pidana( prevention without punishment),**
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media( influencing views of society on crime and punishment/mass media).<sup>31</sup>**

Pendapat peter ini memberikan gambaran kepada pemerintah bahwa tidak hanya melakukan penegakan hukum melalui pidana tetapi penegakan di luar jalur hukum pidana dapat dilakukan dengan mementingkan kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

Penulisan ini penulis menggunakan metode empiris – sosiologis dengan teknik atau cara ataupun pendekatan analisis dimana prosedur pemecahan masalah dengan memaparkan secara rinci dan menganalisis data sekunder dan data primer, hal – hal yang di teliti untuk mendapatkan gambaran yang lengkap ataupun obyek dan subyekyang akan diteliti, hal – hal yang demikian ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Bentuk Penelitian
  - a. Penelitian kepustakaan (library Reseach) yaitu dengan mempelajari berbagai literature-literature, pendapat para sarjana,serta perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
  - b. Penelitian lapangan (Field Research) yaitu mengadakan penelitian terjun langsung ke lapangan dengan maksud menghimpun data-data, informasi-informasi, keterangan-keterangan yang diperlukan dan memiliki relevan dengan masalah penelitian.
2. Teknik dan alat pengumpulan data
  - a. Teknik komunikasi langsung yaitu mengadakan kontak langsung dengan sumber data untuk memperoleh data yang akurat melalui wawancara (interview) terhadap penjaga pos lintas batas, petugas Imigrasi, dan Bea dan Cukai yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang akan diteliti.
  - b. Teknik komunikasi secara tidak langsung ,yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi secara tidak langsung dengan sumber data.komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan alat penguimpulan data yang

---

<sup>31</sup> Ibid. Hal.46

berupa angket penelitian yang disebarakan kepada responden(Penjaga pos lintas batas, Petugas imigrasi, dan Bea dan Cukai).

### 3. Populasi dan sample.

#### a. Populasi

Menurut Prof. Hadari Nawawi Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian,yang terdiri dari manusia benda – benda, tumbuh – tumbuhan, gejala – gejala, nilai – nilai atau peristiwa – peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam penelitian.<sup>32</sup> Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian,adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai kepabean dan cukai Jagoi Babang
- b. Masyarakat Perbatasan Jagoi Babang
- c. Petugas Penjaga Pos Lintas Batas
- d. Pengusaha Jagoi Babang

#### b. Sample.

Sample adalah sebagian atau wakil populasi ,pengambilan sample dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

Menurut Ronny Hanitejo,S.H ; “ pada prinsipnya tidak ada peraturan-peraturan yang ketat untuk secara mutlak menentukan berapa persen sample tersebut harus diambil dari beberapa populasi. Namun pada umumnya orang berpendapat sample yang berlebihan lebih baik dari kekurangan sample”.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Prof. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, gama Press, Yogyakarta 1991, Hal 141

<sup>33</sup> Ronny Hanitejo,SH,*Metode Penelitian Hukum*,Ghalia Indonesia ,Jakarta,1988,Hal 47

## BAB II

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### GEOGRAFIS PAS LINTAS BATAS JAGOI BABANG

##### A. Gambaran Daerah Perbatasan Jagoi Babang

Perbatasan terjadi karena adanya dua wilayah yang berbeda sehingga Aelenei mendefinisikan perbatasan adalah sebagai berikut :

*A definition of the border, a method, delimiting and marking it; the papers drawn up by the neighbouring states stipulating the border line; the manner the states referred to regards the issue of bilateral border regime; the internal legislation regarding the border juridical regime.*<sup>34</sup>

Wilayah perbatasan memiliki sumber daya manusia didalamnya, hal tersebut menandakan pentingnya regulasi yang khusus bagi masyarakat perbatasan, dimana memerlukan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh negara, dan negara seharusnya lebih berhati – hati dalam melakukan pengawasan dalam perbatasan disebabkan ruang lingkup geografis diperbatasan sangat sulit terdapat daerah perbatasan yang terpencil dan berada di daerah batas kewenangan teritorial. Secara tradisional perbatasan memiliki aspek dinamis dari sebuah negara, termasuk untuk mengukur kekuatan suatu negara. Nama **Jagoi** berasal dari kata **Bung Jagoi** yang berarti sebuah kampung dipegunungan Sarawak (Malaysia Timur) yang didiami oleh Suku Dayak **Bidayuh**. Jagoi merupakan keturunan dari Suku Dayak **Bidayuh** yang mendiami daerah perbatasan Indonesia-Sarawak (Malaysia Timur). Sebelumnya Desa Jagoi merupakan gabungan dari 6 (Enam) Dusun. Yaitu Dusun **Babang**, Dusun **Risau**, Dusun **Sei Take**, Dusun **Sejaro**, Dusun **Kindau** dan Dusun **Belidak**. Sehingga pada tahun 2005 dengan SK Bupati Nomor : 12 Tahun 2006 Desa Jagoi dimekarkan sehingga terbentuklah Desa **Sekida** yang terdiri dari Tiga (3) Dusun yaitu ;Dusun **Sejaro**,Dusun **Kindau** dan Dusun **Belidak**.Sedangkan Desa **Jagoi** sekarang terdiri atas 3(Tiga) Dusun Yaitu; Dusun **Jagoi Babang**, Dusun **Risau** dan Dusun **Sei Take**.<sup>35</sup>

Kecamatan Jagoi Babang merupakan kecamatan yang terletak paling utara Kabupaten Bengkayang yang dibentuk pada tahun 1999. Secara geografis Kecamatan Jagoi Babang terletak di 1015'16" Lintang Utara sampai 1030'00" Lintang Utara dan 109033'95" Bujur

---

<sup>34</sup> Aelenei , Dreptul Frontierei de stat, Bucharest, pro transilvinia publishing house.2001.hal 112

<sup>35</sup> Sumber kepala desa jagoi babang Kasianus Anyiu

Timur dan 109059'27" Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kecamatan Jagoi Babang adalah:

- a.Utara : Serawak-Malaysia Timur
- b.Selatan : Kecamatan Seluas
- c.Timur : Kecamatan Siding
- d.Barat : Kabupaten Bengkayang

Luas wilayah Kecamatan Jagoi Babang pada tahun 2006 adalah sebesar 655,00 km<sup>2</sup> dan terbagi dalam 6 desa. Pada tahun 2003, berdasarkan Perda nomor 26 tahun 2003, Kecamatan Jagoi Babang yang sebelumnya membawahi 5 desa dengan luas wilayah sebesar 1.218,30 km<sup>2</sup> dipecah menjadi 2 kecamatan yaitu Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding. Kecamatan Jagoi Babang wilayahnya mencakup 2 desa lama yaitu Desa Jag Kumba. Berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2003, dua desa yang ada dipecah menjadi 6 desa. Desa Jagoi dipecah menjadi 2 desa yaitu: Desa Jagoi dan Desa Jagoi Sekida. Sedangkan Desa kumba dipecah menjadi 4 desa, yaitu: Desa Kumba, Desa Sinar Baru, Desa Gersik, dan Desa Semunying Jaya. Luas wilayah desa yang paling besar adalah Desa Sinar Baru dan yang paling kecil adalah Desa Jagoi. Dilihat dari jarak antara ibukota kecamatan dengan ibukota desa, letak ibu kota desa yang paling jauh adalah Desa Sinar Baru dan yang paling dekat adalah Desa Jagoi. Jika dilihat dari penggunaan lahan yang ada, sebagian besar wilayah Kecamatan Jagoi Babang masih berupa hutan negara yaitu sekitar 22.697 hektar dan sebagian lagi sudah digunakan sebagai lahan pertanian baik yang berupa lahan sawah maupun lahan kering yang diusahakan untuk pertanian seperti: perkebunan, ladang/huma, dan kebun. Dimana jumlah penduduk jagoi babang dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut :

TABEL 1

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, DAN KEPADATAN MENURUT DESA

Desa	Luas ( Km )	Jumlah Penduduk	Kepadatan
Jagoi	51,69	2.670	52
Jagoi sekida	120,79	2.023	17
Kumba	65,52	1.194	18
Sinar baru	250,00	704	3
Gersik	92,00	1.325	14
Semunying jaya	75,00	341	5
Jumlah	655.00	8.259	13

Sumber data : Kantor Camat Jagoi Babang

Untuk mengetahui Daerah Perbatasan Jagoi Babang dengan Malaysia dapat dilihat dalam tabel 2 sebagai berikut :

TABEL 2  
BATAS ADMINISTRASI KECAMATAN JAGOI BABANG MENURUT DESA

Desa	Utara	Selatan	Timur	Barat
Jagoi	Malaysia Timur	Kec. Seluas	Kec.Seluas	Jagoi sekida
Jagoi sekida	Malaysia Timur	Desa Jagoi	Malaysia Timur	Desa Kumba
Kumba	Malaysia Timur	Desa seluas	Kec.Seluas	Sinar baru
Sinar baru	Malaysia Timur	Desa Kumba	Desa Kumba	Kab.Sambas
Gersik	Desa jagoi sekida	Kec.seluas	Desa Jagoi	Sinar baru
Semunyin jaya	Malaysia Timur	Desa Kumba	Desa Kumba	Kumba

Sumber data : kantor camat jagoi babang

Melihat kondisi kecamatan dan desa yang berbatasan langsung seperti terdapat pada tabel di atas, desa jagoi babang yang sekaligus sebagai kecamatan merupakan pintu keluar masuk kendaraan, orang dan barang akan tetapi perbatasan ini merupakan perbatasan yang belum resmikan oleh pemerintah sehingga pembangunan nasional, khususnya pembangunan daerah perbatasan dibiayai oleh APBN dan APBD yang salah satu sumbernya dari pajak ekspor dan impor.

## **B. Kantor Imigrasi Jagoi Babang**

Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan didalam melaksanakan kegiatan perkantooran diperlukan pekerja yang disebut dengan Pejabat Imigrasi<sup>36</sup> Fungsi Keimigrasian<sup>37</sup> adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat dimana tersediannya tempat - tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. Dalam menjalankan tugas sebagai petugas khususnya keimigrasian petugas mempunyai hambatan dan kebutuhan kebutuhan yang mendukung untuk menunjang kebutuhan pelayanan kepada masyarakat perbatasan diantaranya hambatan yang dialami

<sup>36</sup> Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ke imigrasian.

<sup>37</sup> Dr sumarsono fungsi Imigrasi penjaga pintu gerbang negara bukan penjaga garis batas negara

adalah khususnya Keimigrasian Jagoi Babang, keterbatasan sumber daya manusia yang profesional untuk menjalankan tugas diperbatasan terkait pula keterbatasan sarana pendukung ketiadaan insentif khusus daerah perbatasan, prasaran untuk menunjang kondisi fisik pos lintas batas yang kurang memadai sebagai pintu masuk dan pintu terdepan negara Indonesia disisi lain hal yang sangat penting dan segera diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah lokasi , yang menyulitkan pengawasan dan pemeriksaan terlebih jika di dalam hutan dengan sebutan jalan tikus<sup>38</sup> atau jalan setapak jalan setapak Bab II Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Bagian Kesatu Umum

### **Pasal 3**

- (1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian, Pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian.
- (2) Kebijakan Keimigrasian dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas.

### **Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dibentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan.
- (2) Di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (3) Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.
- (4) Selain Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Rumah Detensi Imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.
- (5) Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.

### **Pasal 5**

Fungsi Keimigrasian di setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

### **Pasal 6**

---

<sup>38</sup> Jalan tikus adalah Jalur dimana para pelintas batas menggunakan jalur yang tidak resmi ( bukan Pos lintas batas ) tipe A atau pun Tipe B

Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang Keimigrasian dengan negara lain dan/atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dimana pada pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Impor adalah memasukkan barang ke daerah pabean. Di dalam kawasan daerah *eksportir* maupun *importir* diharuskan untuk memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan dokumen kepabeanan dan melunasi bea masuk di kantor bea dan cukai. Sedangkan pengertian ekspor menurut pasal 1 ayat (14) adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar, bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk :

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri.
- b. Melindungi kelestarian sumber daya alam.
- c. Mengantisipasi kenaikan harga komoditas tertentu didalam negeri.<sup>39</sup>

### **C. Kantor Kepabean**

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruangudara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini yaitu Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batasbatas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sehingga barang masuk halnya wajib diperiksa oleh pejabat bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturnya yang berlaku, Pemeriksaan adalah tindakan untuk memeriksa

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.



sarana pengangkut, barang, bangunan atau tempat lainnya, surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang, serta terhadap orang dalam hal pemeriksaan dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1996 tentang penindakan di bidang kepabean BAB II Pasal 3 sampai dengan pasal 7<sup>40</sup>

### **Pasal 3**

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya.
- (2) Sarana Pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos dikecualikan dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 4**

- (1) Untuk keperluan pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, atas permintaan atau isyarat Pejabat Bea dan Cukai pengangkut wajib menghentikan sarana pengangkutnya.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai berwenang meminta agar sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa ke Kantor Pabean atau di tempat lain yang sesuai untuk keperluan pemeriksaan.
- (3) Atas permintaan Pejabat Bea dan Cukai, pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuka sarana pengangkut atau bagiannya untuk diperiksa.
- (4) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab :
  - a. pengangkut, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Undang-undang;

---

<sup>40</sup> Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1996 tentang penindakan di bidang kepabean BAB II Pasal 3 sampai dengan pasal 7

- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, apabila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Undang-undang.
- (5) Tindak lanjut dari pemeriksaan sarana pengangkut dan barang di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
- a. apabila terdapat pelanggaran, segera dilakukan pencegahan terhadap sarana pengangkut dan/atau barang di atasnya;
  - b. apabila tidak terdapat pelanggaran, segera mengizinkan pengangkut beserta sarana pengangkut berikut barang yang ada di atasnya untuk meneruskan perjalanan.

## **Pasal 5**

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap barang.
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir, eksportir, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau kuasanya wajib menyerahkan barang dan membuka setiap bungkus atau kemasan barang yang akan diperiksa.
- (3) Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan atas resiko dan biaya pihak yang diperiksa.

## **Pasal 6**

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap :
  - a. bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat lain yang penyelenggaraannya dengan izin yang diberikan berdasarkan Undang-Undang; atau
  - b. bangunan atau tempat lain yang menurut Pemberitahuan Pabean berisi barang

dibawah pengawasan pabean.

- (2) Pejabat Bea dan Cukai berwenang memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan merupakan rumah tinggal yang berdasarkan Undang-undang penyelenggaraannya tidak berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dapat memeriksa setiap barang yang ditemukan.

## **Pasal 7**

Pejabat Bea dan Cukai berwenang memeriksa badan setiap orang :

1. Yang berada di atas atau baru saja turun dari sarana pengangkut yang masuk ke dalam Daerah Pabean.
2. Yang berada di atas atau siap naik ke sarana pengangkut yang tujuannya adalah tempat di luar Daerah Pabean;
3. Yang sedang berada di atau baru saja meninggalkan Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat; atau
4. Yang sedang berada di atau baru saja meninggalkan Kawasan Pabean.

### **D. Petugas Pas Lintas Batas (Batalyon 143 Rajawali )**

Fenomena petugas pos lintas batas adalah petugas dari ke Imigrasian tetapi dalam pelaksanaan terdapat garda – garda atau pos – pos yang menjaga perbatasan dengan jarak 500 meter terdapat petugas pos, antara lain pos batalyon 143 Rajawali dalam hal ini TNI digaris ke 2 setelah kepabeaan, dan garis ke 3 Polri ( Brimob) dan garis ke 4 adalah kantor ke Imigrasian, artinya sangat sulit bagi pelaku usaha untuk melakukan korporasi, tetapi sangat mengherankan barang – barang dapat masuk dengan mudah dan sangat mudah dengan apa yang dibayangkan ditambah dengan petugas dari Askar. Fenomena seperti sangat menarik dalam hal ini tugas penjaga pos yang akan saya paparkan bahwa dalam peristiwa ini terjadi korporasi dalam kegiatan peristiwa hukum, petugas pos tidak melihat seberapa banyak barang yang di bawa oleh pelaku usaha ( calok ) tetapi mereka hanya melakukan pemeriksaan PLB dalam pemeriksaan tersebut petugas diberikan sejumlah uang diselimuti dengan amplop, dalam prakteknya dilapangan dengan pak hendro ( nama disamarkan ) pelaku usaha yang membawa barang – barang dari malaysia mengatakan dalam melintas mereka biasanya menyeter atau memberikan amplop kepada petugas dengan setiap petugasnya 500 ribu rupiah.

## **E. Kartu Identitas Lintas Batas dan Pas Lintas Batas**

### **a. Kartu Identitas Lintas Batas**

Dalam peraturan menteri keuangan Nomor 188 /PMK.04/2010 dalam BAB I ketentuan umum Pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa kartu pas lintas batas yang selanjutnya disebut dengan KILB adalah kartu yang dikeluarkan oleh kantor pabean yang membawahi pos pemeriksaan lintas batas yang diberikan kepada pelintas batas setelah memenuhi persyaratan tertentu<sup>41</sup>. Dalam hal ini dalam peraturan menteri ini dalam hal pemeriksaan dan pengeluaran barang impor yang dibawa pas lintas batas, pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pelintas batas yang membawa barang wajib mempunyai KILB, maka dari itu benar jika masyarakat perbatasan jagoi atau oknum ( agen ) pengusaha memanfaatkan PLB sebagai alat untuk memasukan barang dari Malaysia ke Indonesia dan sebaliknya.

### **b. Pas Lintas Batas**

Berdasarkan undang – undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 29 menjelaskan bahwa pas lintas batas adalah surat perjalanan laksana paspor yang dikeluarkan oleh pihak keimigrasian bagi warga negara indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara republik indonesia dengan negara lain Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas.

Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.<sup>42</sup> Sesuai dengan perjanjian lintas batas, perjanjian pas lintas batas menjadi dasar adalah Agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the Malaysia on border crossing. Dimna fungsi dari pas lintas batas tersebut digunakan untuk keperluan dan kemudahan masyarakat perbatasan serta kepentingan pemerintahan dimana kegiatan tersebut bersifat kunjungan kekeluargaan, kegiatan sosial budaya, perdagangan perbatasan, serta aktivitas – aktivitas lain yang disepakai oleh kedua belak pihak<sup>43</sup>. Pas Lintas Batas ini dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Keimigrasian Republik Indonesia yang berada di daerah perbatasan, yang telah di Undang – Undangkan untuk memperkuat kinerja pemerintah.

---

<sup>41</sup> Peraturan menteri keuangan Nomor 188 /PMK.04/2010 dalam BAB I ketentuan umum pasal 1 ayat 13

<sup>42</sup> Undang – Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 29

<sup>43</sup> Jurnal Ilmu pemerintahan, kristofus Orlando. Fisipol Universitas Tanjungpura

## **F. Pengawasan petugas Pos Lintas Batas**

Pengawasan yang dilakukan terhadap keluar masuknya barang baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang melalui perbatasan Jagoi Babang selalu dilakukan pemeriksaan dan keluar masuknya barang tidak dilakukan pemeriksaan, yang diperiksa hanya dokumen kendaraan dan orangnya saja. Hal ini membuktikan bahwa petugas perbatasan Jagoi Babang belum berperan secara optimal dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana serta masih lemahnya sistem pengawasan atau pemeriksaan terhadap keluar masuknya barang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kurang berperannya petugas perbatasan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap keluar masuknya barang merupakan peluang bagi pengusaha untuk menyalahgunaan Pas Lintas Batas sebagai alat untuk dapat memasukan barang- barang dari malaysia yang melebihi kapasitas yang sudah ditentukan oleh kedua negara dalam perjanjian bilateral kedua negara tanggal 24 Agustus 1970 tentang perdagangan lintas batas antara Indonesia dengann Malaysia.

## **G. Analisis dan Pembahasan**

### **1. Analisis Mengapa Terjadinya Pemanfaatan Pas Lintas Batas Oleh Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Pas Lintas Batas Jagoi Babang**

Masyarakat perbatasan dalam posisi cenderung sebagai obyek dari kebijakan pembangunan dan pengelolaan perbatasan, perbedaan kondisi ekonomi sosial ekonomi di wilayah perbatasan antar negara itu dapat menimbulkan sejumlah efek negatif yang cenderung merugikan wilayah perbatasan Indonesia. Efek negatifnya adalah perambahan yang dialukan oleh negara tetangga yang dapat terjadi secara disengaja atau tidak sengaja, miaslnya pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak – pihak dari negara tetangga tanpa adanya kompensasi dan kewajiban – kewajiban yang memadai yang dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan maupun gangguan terhadap kehidupan sosial wilayah perbatasan yang disebut dengan polarization effect<sup>44</sup>. Semakin besarnya spektrum perdagangan lintas batas, baik dari sisi kualitas barang yang diperdagangkan, kwanntitas jenis komoditi, penyebaran barang atau komidi yang diperdagangkan dan pertumbuhan pelaku usaha peragangan perbatasan, tentu saja menimbulkan permasalahan baru yaitu timbulnya

---

<sup>44</sup> Polarization effect : Tertarik/ditariknya sumber daya alam dan manusia suatu negara ke negara tetangga untuk membangun pusat – pusat pertumbuhan baru di wilayah negara tetangga tersebut yang berakibat terjadinya pengosogan kegiatan ekonomi di wilayah – wilayah perbatasan negra yang tertarik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

konflik kepentingan antara daerah dengan pemerintah pusat.<sup>45</sup> Bagi masyarakat jagoi babang khususnya masuknya barang – barang kebutuhan hidup ( kebutuhan pokok ) dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga kebutuhan pokok dari Indonesia dalam negeri seperti gula, gas, beras, minyak goreng, bawang, garam dan lainnya. Di lihat dari keinginan masyarakat perbatasan menunjukkan bahwa masyarakat diperbatasan masih sangat bergantung terhadap Ringgit<sup>46</sup> dan produk – produk dari malaysia, dimana ketergantungan produk – produk tersebut akan mendapatkan keuntungan yang dapat menyetarakan kehidupan. Fenomena masyarakat perbatasan juga memperlihatkan bagaimana mereka ( masyarakat perbatasan) untuk memilih apakah mentaati, menghindar, atau melawan hukum terhadap kepentingan mereka jika hukum yang mengatur ke unikan mereka di daerah perbatasan dilaksanakan secara kaku dimana akan mengakibatkan pengabaian hukum melihat kegiatan atau peristiwa hukum yang terjadi diperbatasan dalam proses penegakan hukum Prof Barda berpendapat ukuran formal atau obyektif itu pun masih harus di uji secara materi, apakah alasan pembenaran atau tidak dan apakah perbuatan itu betul – betul bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat<sup>47</sup>. Peristiwa hukum yang sangat menarik khususnya di masyarakat perbatasan, pemerintah Indonesia dalam hal ini ke Imigrasian Jagoi Babang mengeluarkan suatu kebijakan khusus bagi masyarakat perbatasan untuk dapat bepergian di wilayah tetangga ( Malaysia ), dalam hal ini berkunjung<sup>48</sup>, dan liburan. Tetapi sering dijumpai, bahwa di perbatasan Jagoi Babang Pas Lintas Batas digunakan oleh oknum dalam hal ini pengusaha,<sup>49</sup> memanfaatkan Pas Lintas Batas untuk melewati petugas Pas Lintas Batas, dengan membawa barang barang yang akan diperjualkan kembali di wilayah Indonesia, dimana pengusaha di daerah perbatasan menurut beberapa pengusaha pemilik toko yang menjual barang – barang yang berasal dari malaysia antara lain gula, beras, bawang, gas, minuman dan lain – lain yang bernama disamakan ( Nensi ) *Bahwa mereka memesan kepada salah satu pembawa ( membawa dengan motor kecil ) barang dari malaysia ke*

---

<sup>45</sup> Dr. Firdaus SH. Mhum. seminar daerah perdangan lintas batas kalimantan barat dan sarawak, Program Magister Ilmu hukum Untan., Tanggal. 9 desember 2013.

<sup>46</sup> Ringgit adalah Mata uang Negara Malaysia

<sup>47</sup> Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, Perkembangan asas hukum pidana Indonesia, Pustaka Magister semarang, 2008, Hal.30-32

<sup>48</sup> Dr.Budi hermawan Bangun, kerjasama sosial ekonomi dalam konteks pengelolaan perbatasan kalimantan barat – sarawak, seminar daerah perdangan lintas batas kalimantan barat dan sarawak, Program Magister Ilmu hukum Untan., Tanggal. 9 desember 2013

<sup>48</sup> Dr. Firdaus SH. Mhum. seminar daerah perdangan lintas batas kalimantan barat dan sarawak, Program Magister Ilmu hukum Untan., Tanggal. 9 desember 2013.

<sup>49</sup> Pasal 1 angka 14 undang – undang nomor 18 tahun 2000, pengusaha adalah orang atau pribadi atau badan dalam bentuk apun yang kegiatannya usaha atau pekerjaannya ; menghasilkan barang, mengimpor, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabeaan, untuk melakukan usaha jasa, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabeaan.

Indonesia. Artinya dalam peristiwa ini, menurut salah satu petugas perbatasan yaitu Pratu W. Saputro ( Nama disamarkan ) dari satuan 241 rajawali : ***Menyatakan mereka hanya melakukan pemeriksaan kepada pembawa barang, apakah barang tersebut melebihi kapasitas dari 600 ringgit, atau tidak mereka tidak dapat melakukan penangkapan atau penahanan terhadap pembawa barang tersebut, tetapi tidak melakukan pemeriksaan PLB,*** hal yang menjadi fenomena menarik dalam didaerah perbatasan ini adalah dalam pemeriksaan oleh petugas bukannya PLB yang di lakukan pemeriksaan tetapi sebaliknya pembawa barang yang memberikan PLB Amplop yang berisikan sesuatu yang disebut dengan Uang sebagai pengganti pemeriksaan, hal yang sangat menarik terjadinya Korporasi<sup>50</sup> antara petugas Askar<sup>51</sup> dengan pelaku pembawa barang yang melebihi dari 600 ringgit menurut salah satu pelaku ( Citro ) Nama di samarkan mengungkapkan dalam pemeriksaan oleh askar pelaku dapat melobi atau koordiasi dan memberikan beberapa atau sejumlah uang bergantung dengan kesepakatan keduanya, berbeda dengan pelaku yang sudah dikenal oleh askar, maka mereka tidak dilakukan pemeriksaan dengan hanya memberikan amplop. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa bagaimana dapat dikatakan bahwa telah terjadi pemanfaatan Pas Lintas Batas ini antara lain adalah karena kepabeaan tidak mengeluarkan KILB,<sup>52</sup> dan Modus pengusaha atau pelaku melakukan korporasi dengan menyuap atau memberikan petugas perbatasan sejumlah uang, disisi lain peluang mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menjual kembali barang tersebut di wilayah Indonesia.

## **2. Pembahasan Terjadinya Pemanfaatan Pas Lintas Batas oleh Pihak Ketiga Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Lintas Batas Jagoi Babang**

Memanfaatkan belum diresmikannya perbatasab Jagoi Babang sebagai jalur resmi keluar masuknya barang sehingga membuat pelaku ( pengusaha ) hal ini untuk menghindari bea masuk dan bea keluar serta mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, berbagai cara dan modus memanfaatkan PLB tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor intern dan ekstern, faktor intern terdapat pada diri pelaku itu sendiri, terutama atau kehendak yang sudah

---

<sup>50</sup> Ferrys Zainuddin, SH MA & Sri Ismawati SH.M.Hum, Hukum pidana diluar kodifikasi, FH. Untan Press, Pontianak. 2010. Hal.12. Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

<sup>51</sup> Askar tentara malaysia yang bertugas di daerah perbatasan yang menjaga di daerah perbatasan antara indonesia dengan malaysia.

<sup>52</sup> KILB adalah kartu identitas lintas batas yang dikeluarkan oleh kepabeaan di untuk keperluan belanja diluar negeri dalam hal ini Malaysia.

ada dan direncanakan terlebih dahulu. Sedangkan factor eksteren diluar diri si pelaku, seperti keadaan geografis, mental aparat penegak hukum, keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Pada umumnya pemanfaatan dilakukan secara terorganisir yang melibatkan berbagai pihak dengan perencanaan dengan memanfaatkan keadaan yang kurang memadai diperbatasan Jagoi Babang. Mengapa kejahatan kepabeanan ini sangat menarik dan banyak dilakukan oleh anggota masyarakat, Drs.H.A.K.Moc. Anwar S.H, mengomentari sebagai berikut :

i. Faktor Geografis

Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, merupakan daerah pantai dan negara yang baru berkembang sehingga dijadikan daerah untuk melakukan penyelundupan barang dari negara industri.

ii. Faktor Kelebihan Produksi

Factor produksi ini merupakan suatu kelebihan produksi yang dimana di negaranya tidak digunakan atau berlebihan sehingga harus dijual keluar negeri sebagai contoh Negara maju seperti jepang, yang kelebihan produksi mobil dan motor tidak bisa memasarkan lagi di negaranya atau negara lain, sehingga berusaha memasarkannya ke Indonesia secara ilegal.

iii. Faktor Kelemahan Industri Dalam Negeri

Sebagai negara yang baru berkembang, dimana industri dalam negeri belum mampu dengan industri luar negeri, hal ini disebabkan oleh faktor biaya yang tinggi, sarana yang belum memadai, pemasaran yang belum mampu bersaing dengan barang impor sehingga tidak bisa memenuhi kekurangan dalam pengadaan barang kebutuhan rakyat.

iv. Faktor Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam menanggulangi penyelundupan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Masyarakat bahkan membiarkan hal itu terjadi karena mereka dapat membeli barang-barang yang murah namun mutunya bagus. Pada umumnya hasil selundupan selalu murah dipasaran bebas.<sup>53</sup>

Keadaan seperti ini dikembalikan ke teori yang telah dikembangkan oleh Soerdjono Soekanto, yang beranggapan :

---

<sup>53</sup> H.A.K.Moch Anwar.Segi-Segi Hukum Penyelundupan. Cetakan Ke II. Bandung: Alumni. 1982. Hal 54



**Bahwa peran masyarakat yang dapat menerima, serta aparat hukum yang penuh toleransi merupakan hambatan dalam penegakan hukum. Dan toleransi aparat penegak hukum itu tergantung pada faktor- faktor ekstrim tidaknya pelanggaran norma tersebut, faktor keadaan social ketika itu terjadi, status dan reputasi yang melakukan pelanggaran, macam-macam persoalan yang bersangkutan dalam pelanggaran dan azasi tidaknya nilai moral yang terkandung didalam norma yang terlanggar.<sup>54</sup>**

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemanfaatan PLB adalah sebagai berikut:

1. Kurang tegasnya aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum yang selalu memberikan toleransi terhadap pelaku menyebabkan tidak adanya efek jera yang dialami oleh pelaku ( pengusaha ) sehingga para pelaku mengulangi perbuatannya secara terus-menerus tanpa perlu takut dengan aparat penegak hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan diberikanya toleransi yaitu keadaan sosial masyarakat ketika terjadi status dan reputasi yang melakukan pelanggaran, berat tidaknya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

2. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum

Lemahnya koordinasi anantara aparat penegak hukum dengan instansi terkait lainnya menyebabkan lemahnya pengawasan dan belum maksimalnya penanganan. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kerjasama saat melakukan penjagaan dan pemeriksaan di pos pemeriksaan lintas batas, di sini petugas dari masing-masing instansi bekerja sendiri-sendiri sehingga tidak di ketahui jika dalam melakukan pemeriksaan ada oknum petugas yang menerima uang dari oknum yang tidak bertanggungjawab.

3. Keadaan sosial ekonomi masyarakat perbatasan Jagoi Babang

Masyarakat di perbatasan Jagoi Babang rata-rata hidup dengan mengandalkan usaha rumah tangga (seperti membuat bidai), petani ( meladang ) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga, keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh pengusaha atau pemilik modal untuk merekrut masyarakat sebagai sopir truk pengangkut dan buruh pikul untuk

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Bandung: Alumni. 1985. Hal 6

memindahkan barang Keadaan seperti ini sesuai dengan pendapat Thomas van Aquino (1226-1274) usaha mempertahankan diri atau usaha secara illegal untuk memenuhi kebutuhan hidup memaksa orang diperbolehkan untuk mencuri (Summa Theologica Thomas van Aquino).<sup>55</sup> Bahwa dalam hal ini masyarakat perbatasan melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau dalam istilah hukumnya tindak pidana yaitu tindak penyelundupan menurut Prof.Dr.Baharudin Lopa,SH membagi penyelundupan menjadi dua macam berdasarkan bentuknya, yaitu:

**a. Penyelundupan Administratif adalah pemasukan atau pengeluaran barang yang dilengkapi dengan dokumen dan melewati pelabuhan resmi tetapi data yang tertulis dalam dokumen serta dilaporkan kepada petugas bea dan cukai tidak sesuai kenyataan barang yang sebenarnya. Dalam penyelundupan ini kejahatan terletak pada manipulasi dokumen barang.<sup>56</sup>**

**b. Penyelundupan fisik adalah membawa masuk atau mengeluarkan barang ke atau dari daerah pabean Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen kepabeanan. Walaupun pemasukan dan pengeluaran barang melalui pelabuhan-pelabuhan resmi, tetapi dokumen kepabeanannya tidak ada.<sup>57</sup>** Sehingga menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melakukan penegakan atau tindak represif, atau menjadi pedoman kepada penegak hukum untuk mengatakan bahwa atau para ahli hukum mengatakan hal tersebut adalah tindak pidana, berdeda dengan pendapat para ahli hukum pemerintah daerah.

#### **H. Regulasi agar tidak terjadi penyalahgunaan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang**

Pas Lintas Batas merupakan hasil dari perjanjian kerjasama antara Indonesia dan Malaysia isi perjanjian itu keluaranlah suatu kebijakan yang disebut dengan Pas LintasBatas ( PLB ) oleh kementerian Hukum dan Ham dan dikeluarkan oleh Dirjen KeImigrasian dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam pelaksanaan kebijakan perlu adanya evaluasi terhadap suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menurut Widodo mempunyai 5 tahap evaluasi adapun tahapan tersebut sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program, dan kegiatan

---

<sup>55</sup> Dr.Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. CV.Rajawali. 1987. Hal 16

<sup>56</sup> Prof.Dr.Baharudin Lopa,SH. Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan. Jakarta: Pradya Paramita. 1990. Hal 83

<sup>57</sup> Ibid. Hal 85

2. Penjabaran tujuam kebijakan, program dan kegiatan kedalam kriteria atau indikator perencanaan tujuan
3. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan program
4. Berdasarkan indikator pencapaian tujuu kebijakan program tadi dicarikan datanya dilapangan
5. Hasil data yang diperoleh dilapangan kemudian dilakukan pengelolaan dan dikomprasikan dengan kriteria pencapaian tujuan,<sup>58</sup>

Melihat pendapat Widodo ini melihat tujuan dari pas lintas batas ini adalah masyarakat perbatasan dapat melakukan lintas batas negara dengan mudah tanpa harus menggunakan paspor, tetapi dalam prakteknya dilapangan tujuan ini tidak sama dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah, karena masyarakat pperbatasan dapat menggunakan pas lintas batas ini untuk dan sebagai alat mencapai suatu cita – cita atau tujuan lain, artinya dapat digunakan sebagai suatu cita – cita mencapai suatu kemakmuran atau kesejahteraan dengan membeli barang yang berasal di wilayah Malaysia dan menjualnya kembali ke wilayah Indonesia, yang dalam undang – undang fungsi dari Pas Lintas batas hanya untuk keperluan berkunjung, kegiatan sosial budaya dan kepentingan pemerintah. Sehingga perlu adanya indikator – indikator yang akan mengevaluasi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pendapat William dalam buku Subarsono Indikator untuk mengevaluasi suatu kebijakan sebagai berikut :

1. Efektifitas
2. Kecukupan
3. Pemerataan
4. Responsivitas
5. Ketepatan<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Joko Widodo, Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik, Bayumedia punlising, Malang, 2008. Hal.125

<sup>59</sup> Subarsono, Analisis Kebijakan publik ( *Konsep, Teori, dan Aplikasi* ) Pustaka pelajar, Joyakarta, 2010. Hal126

Berdasarkan teori tersebut maka dampak yang akan terjadi dalam penggunaan pas lintas batas ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu dampak positif dan dampak negatif dari kebijakan pemerintah adapun dampak tersebut sebagai berikut :

#### 1. Dampak positif dikeluarkan Pas Lintas Batas

Dampak dikeluarkannya kebijakan oleh pemerintah dalam hal ini Pas Lintas Batas di perbatasan Jagoi Babang dengan melihat dari hasil penelitian serta data yang didapatkan dilapangan dampak positif dari dikeluarkannya Pas Lintas batas ini adalah sebagai berikut :

- a. Mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari ( kebutuhan pokok ), tujuan dari pemerintah membuat kebijakan adalah mencapai suatu kemakmuran dan kesejahteraan diperbatasan perjanjian dengan ketentuan tertentu, dimana untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan tersebut dibuat lah batasan 600 ringgit malaysai per-orang, per-bulan dalam hal ini kebutuhan sehari hari seperti : Beras, Minyak goreng, Gas, dan lain - lain yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat perbatasan
- b. Terjadinya hubungan baik antara penduduk perbatasan ( Malaysia – Indonesia) tujuan dikeluarkannya pas Lintas batas salah satunya adalah untuk kegiatan sosial budaya, dimana pemerintah sudah membuka jalan kepada masyarakat perbatasan untuk menggunakan hak mereka untuk melakukan kegiatan sosial budaya dengan negara tetangga di daerah perbatasan untuk mempererat tali persaudaraan yang masih serumpun.
- c. Dapat dengan mudah melakukan kunjungan wisata ( berlibur ) tujuan lain adalah kunjungan ( liburan ) pemerintah juga memberikan kesempatan kepada mereka masyarakat perbatasan yang ingin kerkunjung liburan di wilayah Malaysia dapat menggunakan sarana ini, karena pada prinsipnya pas lintas batas ini disamakan oleh pemerintah pengganti paspor.

#### 2. Dampak negatif dikeluarkan Pas Lintas Batas

Dalam setiap kebijakan dalam pelaksanaan suatu keputusan baik dalam tingkat nasional maupun tingkat daerah pasti mempunyai kelemahan dan dampak yang akan merugikan

kepentingan pribadi, lembaga, ataupun negara, dalam hal ini dampak negatif dari kebijakan di keluarkannya pas lintas batas sebagai berikut :

a. Terjadinya praktek Pungutan liar

Dalam peristiwa yang terjadi di perbatasan Jagoi Babang tidak dipungkiri terjadinya praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum di daerah perbatasan, fakta nya mereka oknum di perbatasan berspekulasi bahwa tidak terjadi peristiwa hukum di wilayahnya tetapi dalam penegakan hukum terdapat bermacam jenis kejahatan yang terjadi di perbatasan sebagai contoh mereka ( agen ) calok atau pengusaha membawa barang dari Malaysia ditangkap oleh penegak hukum dalam hal ini POLRI menjadi hal yang tidak mungkin dalam dunia hukum karena terjadinya peristiwa hukum itu mempunyai tahapan – tahapan tertentu, memasukan gula dari perbatasan harus melewati bea dan cukai, pemeriksaan, dan sebagainya tetapi mengapa POLRI melakukan penegakan hukum? Artinya jika barang atau gula tersebut sudah masuk di wilayah indonesia dan berada diluar daerah pabean maka barang atau gula tersebut sah secara hukum, akan tetapi POLRI menjerat mereka ( agen ) pengusaha atau sejenisnya dengan undang – undang yang lain seperti perlindungan konsumen.

b. Terjadinya Praktek perdagangan Ilegal

Pas lintas batas sesungguhnya digunakan untuk kebutuhan pokok sehari – hari untuk melangsungkan kehidupan. tetapi dalam peristiwa hukum yang terjadi di perbatasan Jagoi babang Pas lintas batas digunakan untuk keperluan perdagangan yang tujuannya untuk mencari keuntungan yang sebesar – besarnya dengan cara membeli barang – barang pokok atau barang yang berasal dari Malaysia untuk dijual di wilayah perbatasan, hal yang sangat prihatian adalah pas lintas batas digunakan untuk membawa barang – barang tersebut masuk di daerah Indonesia, yang seharusnya membawa dengan menggunakan kartu identitas lintas batas tetapi dalam prakteknya fakta dilapangan tidak ada satupun penduduk perbatasan yang mempunyai kartu identitas lintas batas, artinya sudah terjadi hal yang merugikan kepentingan negara dalam pendapatan pajak nasional, dan peristiwa ini disebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau kejahatan.

c. Terjadinya praktek fasilitas tenaga kerja Ilegal

Salah satu fungsi dari pas lintas batas adalah untuk melakukan lintas batas dimana mempunyai masa berlaku hanya 2 tahun dan batas waktu untuk tinggal selama 30 hari

atau 1 bulan, keadaan ini dimanfaatkan oleh masyarakat perbatasan untuk mencari pekerjaan tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang mendukung dan standarisasi menjadi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri artinya sudah terjadi perbuatan hukum yang sering disebut dengan Illegal. Dalam hal ini masyarakat perbatasan tidak melihat apa yang terjadi di daerah perbatasan khususnya Jagoi Babang, pemerintah hanya bisa melakukan penegakan hukum yang semata – mata menghukum mereka tetapi penegak hukum tidak mempunyai regulasi – regulasi yang mendukung dan berjangka untuk kebutuhan masyarakat perbatasan secara umum.

Melihat fenomena itu perlu regulasi – regulasi yang mendukung mencegah perbuatan – perbuatan yang dilakukan masyarakat perbatasan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Pasal 1 angka 22 telah menetapkan kawasan perbatasan sebagai PKSN (pusat kegiatan strategis nasional) yang berarti bahwa untuk kedepan kawasan tersebut akan menjadi pusat kegiatan yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan daerah – daerah perbatasan negara tetangga. Tetapi pada kenyataannya dan fakta sampai saat ini belum jelas mengenai perumusan mengenai atau regulasi siapa yang mewujudkan KPSN ini baik dari pemerintah pusat atau daerah sebagai kekuasaan untuk mengatur daerahnya yang dapat digunakan sebagai PAD daerah. Dalam hal ini pemerinath seharusnya memberikan perhatian khusus kepada daerah – daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, khususnya Kalimantan Barat, dikarenakan wilayah perbatasan terdapat transaksi yang tidak dapat dipungkiri, warga dapat menjual brang – barang mentah di luar negeri dengan tidak adanya pengaturan hukum yang jelas diakibatkan harga jual akan relatif lebih rendah arti pentingnya adalah nilai tambah atau penghasilan masyarakat perbatasan dalam sektor ekonomi. Pemerintah harus segera mewujudkan kepentingan masyarakat perbatasan sehingga tidak terjadinya ketidak adilan yang didapatkan oleh masyarakat perbatasan khususnya yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini selalu mencari cara untuk menjerat pelaku usaha yang akan melakukan usaha seharusnya mereka ( masyarakat perbatasan) di fasilitasi untuk melakukan usaha – usaha tersebut agar mereka tidak melakukan hal – hal yang melanggar hukum, sebaliknya pemerintah dalam hal ini dapat meminta membuat suatu aturan kepada pelaku usaha untuk negara dalam hal ini membayar pajak atau bea masuk artinya pemerintah atau negara mendapatkan inkam atau pemasukan dari kegiatan usaha tersebut dikarena Indonesia padan tahun 2015 akan mengikuti perkembangan pasar bebas KEA yaitu kegiatan perdagangan lintas negara yang dimana jika kegiatan seperti ini dilarang dan di cegah maka peran dari Indonesia ikut serta dalam pasar bebas seharusnya mereka dipersiapkan untuk

menghadapi perdagangan bebas agar lebih meringankan pemerintah dalam melakukan pengawasan. Berdagang merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan demi mensejahterakan kehidupannya, untuk mewujudkan hak – hak ekonomi pengelolaan perbatasan yang lebih mengutamakan kesejahteraan seharusnya pemerintah memberikan hak dalam pengelolaan perbatasan negara masyarakat diberikan ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi, berkontribusi dan menikmati hasil pembangunan, strategi pembangunan dan pengelolaan perbatasan negara akan menggali akar masalah hak, bahwa pengelolaan perbatasan sebagai bagian dari pembangunan harus sejalan dengan tuntutan hak asasi manusia sebagai mana diatur dalam hukum nasional dan Internasional<sup>60</sup> sehingga dalam pengelolaan perbatasan negara memerlukan pemahaman komprehensif yaitu dengan menempatkan penduduk di wilayah perbatasan sebagai obyek pengelolaan perbatasan dikarenakan masyarakat tidak lepas dari hukum untuk menjalankan atau menggerakkan hukum itu.<sup>61</sup> Dalam pengelolaan perbatasan harus melibatkan peran para Stake Holders, termasuk dalam hal ini masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan itu sendiri, untuk membuat kebijakan serta melakukan review misi yang ingin dicapai dalam pengelolaan perbatasan, dalam hubungan dengan negara tetangga perjanjian atau kesepakatan mengenai kerjasama pengelolaan perbatasan kawasan perbatasan harus dibuat dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keuntungan bersama dalam arti bahwa masing – masing wilayah perbatasan dan terutama masyarakat yang tinggal di wilayah itu mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut, dalam membuat regulasi ini diperlukan program dan komitmen yang mengarah pada demokrasi global. Komitmen terhadap demokrasi global seperti yang disampaikan wakil Gubernur Cristyandi Sanjaya menyarankan kan dalam perbatasan dibuat kementerian yang mengatur masalah perbatasan bukan hanya di perbatasan kalimantan, tetapi untuk seluruh perbatasan yang ada di Indonesia, hal tersebut pada realitasnya menghadapi kondisi yang sulit atau kompleks, disebabkan unsur ideologi dan kultur yang special di daerah perbatasan<sup>62</sup> terbentuknya kebijakan diperbatasan pada dasarnya hubungan yang terebntuk sangat menentukan kebijakan antara kedua wilayah baik dalam konteks regional maupun internasional artinya hubungan yang dapat diterima kebijakan yang memuaskan dan hubungan diplomatik tidak mungkin hubungan tersebut berjalan dengan baik.

---

<sup>60</sup> M. Syafari Firdaus, DKK. Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia. Jakarta. 2007.hal.1

<sup>61</sup> Satjipto Raharjo, Biar Hukum Mengalir, kompas gramedia.jakarta, 2007. Hal. 133

<sup>62</sup> Couldry, In the place of a common culture. Cultural studies vol.16 2004.hal 14

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Berdasarkan latar belakang pada Bab I sampai dengan Bab III, maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dan mengajukan beberapa saran untuk mencegah terjadinya pemanfaatan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan melalui Pos Lintas Batas Jagoi Babang.

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab pelaku melakukan pemanfaatan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang adalah untuk memperoleh keuntungan yang besar dan memenuhi kebutuhan masyarakat Jagoi Babang.
2. Modus yang digunakan para pelaku, dalam hal ini pengusaha dan supir untuk melakukan aksinya yaitu dengan memanfaatkan perjanjian sosial ekonomi Malaysia dan Indonesia dalam hal penggunaan pas lintas batas yang biasa di gunakan oleh masyarakat kecamatan Jagoi Babang dan sekitarnya untuk belanja kebutuhan pokok di Malaysia dengan jumlah belanja maksimal RM.600 perorang dalam jangka waktu satu bulan dan memberikan sejumlah uang kepada petugas pos yang bertugas di perbatasan Jagoi babang.
3. Koordinasi yang baik antar petugas pos pemeriksaan lintas batas tidak menjamin pecegahan terhadap pemanfaatan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang dapat dilakukan secara optimal karena, terjadinya pemanfaatan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang di sebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.
4. Kurangnya jumlah anggota yang di tempatkan di Perbatasan Jagoi Babang menyebabkan petugas kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap keluar masuknya barang melalui perbatasan Jagoi Babang.
5. Minimnya fasilitas serta peralatan yang dimiliki petugas diperbatasan menyebabkan belum optimalnya kinerja petugas perbatasan.
6. Adanya petugas perbatasan yang menerima sejumlah uang dari para pelaku membuktikan bahwa ada kerjasama dan upaya pembiaran terhadap pemanfaatan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang yang terjadi sehingga dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya rasa loyalitas petugas terhadap pekerjaan yang telah diamanatkan oleh undang-undang.
7. Tidak adanya tindakan hukum terhadap pelaku pemanfaatan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang menyebabkan tidak



adanya rasa takut pelaku terhadap para petugas perbatasan, sehingga pemanfaatan akan terus terjadi selama belum adanya tindakan hukum yang berpihak kepada kepentingan masyarakat perbatasan.

8. Tidak adanya KILB untuk daerah perbatasan Jagoi Babang, sehingga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan PLB dijadikan sebagai alat untuk memasukan barang dari Malaysia

## **B. Saran**

Pada saat ini meningkatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata diikuti semakin meningkatnya tindak pidana dilingkungan masyarakat maupun internasional, dimana ditandai dengan semakin semaraknya tindak pidana. Disinilah saatnya penegak hukum menunjukkan peran dan fungsinya dalam merealisasikan tuntutan masyarakat akan penegakan hukum dalam mencegah atau mengungkapkan tindak pidana ini. Dalam pencegahan atau mengungkapkan. Melihat kondisi yang demikian, maka untuk mengatasi masalah dengan semakin meningkatnya peredaran barang – barang Malaysia maka langkah baiknya penegak hukum harus diberi saranan dan prasarana yang mendukung untuk melakukan tugas, karena diketahui bahwa daerah Jagoi Babang merupakan jalur darat yang berbatasan langsung dengan Malaysia sehingga mudah untuk melakukan tindak pidana jika tidak adanya sarana dan prasarana yang mendukung.

Menurut penulis harus dilakukan tindakan berupa pencegahan dan penindakan adapun yang penulis maksud dengan pencegahan adalah :

1. Melakukan kerjasama dengan masyarakat perbatasan dengan hukum dan mengajak masyarakat untuk saling bahu – membahu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat khususnya masyarakat perbatasan.
2. Meresmikan perbatasan serikin – jagoi babang, sebagai jalur resmi lintas batas antara Malaysia dan Indonesia.
3. Melakukan registrasi dan identifikasi barang yang dibawa oleh masyarakat baik yang berasal dari Malaysia maupun Indonesia.

Selain berupa pencegahan penulis juga melihat pentingnya penindakan adapun hal – hal yang tergabung dalam penindakan menurut penulis adalah :

1. Menerima laporan dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana disekitar perbatasan serikin – jagoi babang ( Malaysia – Indonesia )
2. Melakukan penyidikan cepat laporan dan /atas dengan melihat ketempat keberadaan barang

3. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dan barang bukti yang digunakan sebagai alat bukti dipengadilan negeri.

Apabila langkah – langkah yang dilakukan tersebut diatas belum dikatakan memuaskan, maka perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana berdasarkan undang – undang yang berlaku yang bukan berasal dari negara sendiri (Indonesia) melainkan berasal dari luar negeri (Malaysia) yang bertujuan untuk pelaku merasa jera dan akan menjadi contoh agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama dalam hal ini mengimpor hewan yang berasal dari Luar negari khususnya Malaysia dan penulis mempunyai saran - saran sebagai berikut:

1. Meninjau kembali isi perjanjian sosial ekonomi antara Malaysia antara Indonesia sehingga pas lintas batas tidak bisa di manfaatkan oleh para pengusaha untuk tidak terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang
2. Membuat undang – undang yang mengatur kesejahteraan masyarakat perbatasan.
3. Menambah jumlah anggota dan fasilitas ( border, tempat karantina ) serta peralatan yang diperlukan untuk menunjang kinerja petugas perbatasan dalam mencegah terjadinya pemanfaatan pas lintas batas perbatasan Jagoi Babang.
4. Melakukan tindakan hukum secara tegas terhadap pelaku maupun aparat yang terlibat dalam pemanfaatan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang.
5. Mengeluarkan KILB sebagai sarana untuk menunjang perekonomian masyarakat perbatasan sehingga akan mengurangi terjadinya kejahatan.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
 BAB I      PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	3
E. Kerangka Teoretik .....	4
F. Metode Penelitian .....	14

BAB II	PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Daerah Perbatasan Jagoi Babang.....	16
	B. Kantor Imigrasi Jagoi Babang .....	18
	C. Kantor Kepabean .....	20
	D. Petugas Pas Lintas Batas (Batalyon 143 Rajawali ) ...	23
	E. Kartu Identitas Lintas Batas dan Pas Lintas Batas ....	24
	F. Pengawasan petugas Pos Lintas Batas .....	25
	G. Analisis dan Pembahasan .....	25
	H. Regulasi agar tidak terjadi penyalahgunaan pas lintas batas oleh pihak ketiga terjadinya kejahatan melalui pos lintas batas jagoi babang .....	30
BAB III	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	36
	B. Saran .....	37

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Bacaan

Prof.Dr.Barda Nawawi arief,SH.Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.prenada media grup.jakarta.2011

.....Barda nawawi arief, beberapa aspek kebijakan penegakan hukum pidana. PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 1988

.....Prof.Dr.Muladi,SH dan Barda Nawawi Arief,SH. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung : Alumni. 1992

.....Perkembangan asas hukum pidana Indonesia, Pustaka Magister semarang, 2008

Prof.Dr.Baharudin Lopa,SH. Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan. Jakarta: Pradya Paramita. 1990

Prof. Chairar Arrasjid,SH. Dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.2008

Prof.Dr.Esmiwarassih,SH.MS. Pranata hukum sebuah telaah sosiologi.Undip.semarang.2011.Hal19.  
Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum suatu pengantar,Yogyakarta.Liberti,1986

.....Pranata Hukum, PT.Suryandaru Utama, Semarang, 2005

Prof. Moedjatno. Asas – asas hukum pidana. Rineka Cipta.2002

Prof.Dr.Soerjono Soekanto,SH.,MA. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

.

Prof.Dr.Muladi,SH dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung:Alumni. 1992.  
Hal 20

Dr.Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat. CV.Rajawali. 1987

Dr sumarsono fungsi Imigrasi penjaga pintu gerbang negara bukan penjaga garis batas negara Aelenei , Dreptul Frontierei de stat, Bucharest, pro transilvinia publishing house.2001

Adami chazawi,pelajaran hukum pidana 1,PT.Raja grafindo Persada,Jakarta ,2002

A.K.Moch Anwar.Segi-Segi Hukum Penyelundupan. Cetakan Ke II. Bandung: Alumni. 1982

Cibro Soufnif,SH. Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.1992

Couldry, In the place of a common culture. Cultural studies vol.16 2004

Djoko Prakoso,SH.dkk. Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara. Jakarta. Bina Aksara. 1987

Drs Hari Sasangka, SH, MH mengenai pengertian Narkotika:“Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek Narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja) serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (depenence)

Ferys Zainudin,SH.,MA. Ketentuan Hukum-Hukum Pidana KUHP Buku I. Pontianak: Aufa Grafis. 2004

Fuat usfa & tongat,Pengantar Hukum Pidana ,UMM Press, Malang,2004

H.A.K.Moch Anwar.Segi-Segi Hukum Penyelundupan. Cetakan Ke II. Bandung: Alumni. 1982

Joko Widodo, Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik,Bayumedia punlising, Malang, 2008

Mardjono Reksodiputro, kriminologi dan sistem peradilan pidana, pusat pelayan keadilan dan pengabdian hukum universitas indonesia, Jakarta.hal.2. emile durkheim, The normal and the pathological, dalam marvin E. Wolfgang et.al.The socialogy of crime and delinquency, second edition, john wiley & sons 1970

M. Wahyudi SH.MH, Seminar daerah, perdagangan lintas batas kalimantan barat dan sarawak, PMIH. Pontianak,

M.Faal, Penyaringan perkara pidana oleh Polisi,PT Pradnya Paramitra,Jakarta,1991

M. Syafari Firdaus, DKK. Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia. Jakarta. 2007

Philipus M.Hadjon DKK. Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi. Gadjah Mada University press. Yogyakarta.2012

Prapto Supardi. Tindak Pidana Penyelundupan. Jakarta: Unas. 1987

P.A.F.Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru. 1993.

Rahardjo,Satjipto. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.2010

Ronny Hanitejo,SH,metode Penelitian Hukum,Ghalia Indonesia ,Jakarta,1988

Satjipto Raharjo, Biar Hukum Mengalir, Kompas Gramedia,jakarta, 2007

Soerjono Soekanto.sosiologi Hukum dalam masyarakat, rajawali Pers Jakarta, Jakarta 1982.

.....faktor – faktor yang mempengaruhi penegak hukum ,PT.Raja grafindd persada,Jakarta 1983

.....Pidato Pengukuhan Guru Besar. Bandung: Alumni. 1985

Soedjono.D. Kriminologi suatu pengantar, Ghalia Indonesia. 1976

Sudarto, Hukum dan hukum pidana, bandung, Alumnus, 1981,hal,159. Sudarto, hukum pidana dan perkembangan masyarakat , bandung, Sinar Baru.1983

Subarsono, Analisis Kebijakan publik ( *Konsep, Teori, dan Aplikasi* ) Pustaka pelajar,Joyjakarta, 2010.

Sofjan Sastrawidjaja. Hukum Pidana I. CV. Armico. 1990

Topo santoso dan eva achjani zulfa, kriminologi ,PT. Raja grafindo persada,jakarta, 2010

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim,Politik Hukum Pidana,Pustaka pelajar Yogyakarta 2005.

Wirjono projodikoro,Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,PT.Eresco Bandung,1998

W.J.S.Purwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1993

## **Makalah**

- BAPPENAS. Bab II Draf Rencana Ink pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan tahun 2011-2014
- Summary Report, Resource materil series no. 7 UNAFEI 1974.
- Dr.Budi Hermawan Bangun, kerjasama sosial ekonomi dalam konteks pengelolaan perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak, seminar daerah perdangan lintas batas kalimantan barat dan sarawak, Program Magister Ilmu hukum Untan,. Tanggal. 9 desember 2013
- Dr. Firdaus SH. Mhum. seminar daerah perdangan lintas batas kalimantan barat dan sarawak, Program Magister Ilmu hukum Untan,. Tanggal. 9 desember 2013
- Dr Sumarsono fungsi Imigrasi penjaga pintu gerbang negara bukan penjaga garis batas Negara
- Yesmil anwar dam adang, pengantar sosiologi hukum, grafika, [books.google.co.id/books/isbn9790255179](https://books.google.co.id/books/isbn9790255179)
- Jurnal Ilmu pemerintahan, kristofus Orlando. Fisipol Universitas Tanjungpura

**Undang – undang**

- Undang – undang nomor 18 tahun 2000 Tentang Imigrasian Pasal 1 angka 14
- Undang – undang dasar 1945 Amandemen ke 4
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Kitab undang – undang hukum pidana, Kesindo Utama, Surabaya.2007
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1996